

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan serta melaporkan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah berlaku. Pedoman SAK tersebut memberikan ruang fleksibilitas bagi entitas dalam mengadopsi kebijakan akuntansi tertentu yang akan diimplementasikan saat memformulasikan laporan keuangan mereka. Salah satu prinsip yang dapat digunakan adalah *prudence* atau sering disebut konservatisme. Namun, sejak tahun 2010 istilah konservatisme tidak lagi digunakan dalam *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dan digantikan oleh *prudence*. Konservatisme dan *prudence* memang hampir sama, namun dalam konservatisme, laba dan pendapatan akan diakui jika benar-benar telah terealisasi, sedangkan dalam *prudence accounting*, ketika terjadi laba dan pendapatan atau menurunnya kewajiban dan beban walaupun belum terealisasi tetap akan diakui jika memang kriteria dalam pengakuan tersebut sudah terpenuhi (Mubarok et al., 2022).

Implementasi konvergensi IFRS telah menggeser orientasi akuntansi konvensional dari yang semula berbasis konservatisme murni menuju adopsi konsep kehati-hatian (*prudence*). Yang dimaksud dengan *prudence* dalam IFRS adalah pengakuan pendapatan yang boleh diakui meskipun masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan (*revenue recognition*), namun tetap saja menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengakuannya. Setelah SAK mengadopsi IFRS, IASB mengatakan bahwa sebenarnya baik *prudence* maupun konservatisme bukanlah kualitas informasi akuntansi yang diinginkan, sehingga mereka menciptakan IFRS dengan harapan laporan keuangan dapat menjadi relevan dan andal. Namun, pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan tetap harus berhadapan dengan ketidakpastian di tengah era IFRS. Langkah yang dinilai efektif untuk memitigasi kondisi tidak menentu

tersebut yaitu dengan mengadopsi asas kehati-hatian secara proporsional di dalam penyajian laporan keuangan. Manifestasi asas kehati-hatian tersebut secara eksplisit diakomodasi di dalam regulasi PSAK No. 14. tentang Persediaan dan PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset. Dalam PSAK No. 14, ketentuan tersebut mengamanatkan penyajian pos persediaan berdasarkan komparasi nilai paling minimum antara beban perolehan dan realisasi neto, yang diperkuat oleh PSAK No. 48 melalui kewajiban pengakuan instan atas dampak kerugian penurunan nilai aset pada laporan laba rugi komprehensif (Aristiani et al., 2017).

Titik pembeda utama antara konsep *prudence* dan konservatisme sebenarnya berada pada mekanisme pengakuan komponen keuangannya. Di mana konservatisme merupakan prinsip yang mengakui utang dan biaya dengan segera, tetapi laba dan aset tidak segera diakui walaupun kemungkinan terjadinya besar. Sedangkan penerapan *prudence* tidak sesekstrim konservatisme tersebut. Prinsip *prudence* dapat mengakui adanya kenaikan aset atau menurunnya kewajiban dan beban dengan suatu kondisi tertentu walaupun belum terealisasi asalkan telah memenuhi kriteria pengakuan suatu pos. Kondisi tersebut bertumpu pada premis bahwa asas kehati-hatian tetap mengizinkan pencatatan keuntungan secara instan, dengan catatan seluruh kriteria serta indikator realisasi pendapatan telah terpenuhi secara sah. Perubahan aset dan liabilitas dan beban bahkan jika mereka belum diakui, asalkan kondisi tertentu terpenuhi (Heryad, 2023)

Implementasi asas kehati-hatian ini dinilai sebagai instrumen yang tepat guna memitigasi berbagai spekulasi dan ambiguitas saat mengonstruksi pelaporan keuangan perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seperti PSAK No. 14 tentang Persediaan dan PSAK No. 48 tentang penurunan nilai aset menetapkan penggunaan konsep *prudence* dalam menilai persediaan dan mengakui penurunan nilai aset. Namun, di sisi lain, konsep *prudence* ini masih banyak pro dan kontra dalam penggunaannya. Heryandi dan Agustina (2024) berpendapat prinsip *prudence* dianggap sebagai kendala atau hambatan dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu tidak tercapainya tujuan pengungkapan penuh semua informasi yang relevan. Di sisi lain, prinsip *prudence* dalam akuntansi memiliki

manfaat dalam mencegah manajer melakukan tindakan oportunistik terkait kontrak yang bergantung pada laporan keuangan. Pihak yang mendukung prinsip kehati-hatian juga ingin memastikan agar perusahaan tidak memberikan laporan kinerja yang berlebihan, sehingga pihak eksternal seperti kreditor dan investor tidak tertipu oleh nilai aset yang terlihat lebih tinggi dari seharusnya. Langkah ini diambil demi menjamin agar proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan tidak terdistorsi atau salah arah akibat informasi keliru yang disajikan (Amrillah & Zulfikar, 2024).

Fenomena menarik muncul di kalangan perusahaan properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor ini dikenal memiliki tingkat *leverage* keuangan yang tinggi dan ketergantungan yang tinggi pada utang jangka panjang, yang secara tidak langsung berdampak pada penerapan prinsip *prudence* akuntansi. Sebagaimana yang dialami oleh PT Hanson International Tbk. (MYRX), entitas ini menjadi salah satu contoh konkret yang mencuat ke publik terkait polemik tersebut. Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan tersebut dan membekukan sementara izin usahanya atas pelanggaran dalam pelaporan keuangan dan keterlambatan dalam menyampaikan informasi penting kepada publik. Laporan OJK tahun 2020 menemukan bahwa Hanson International gagal menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), khususnya terkait pengakuan aset dan liabilitas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang tingkat kehati-hatian manajemen dalam menyusun laporan keuangan (CNBC, 2021).

Lebih lanjut, laporan keuangan Hanson International menunjukkan masalah keuangan yang serius. Menurut data BEI, total liabilitas perusahaan pada tahun 2019 mencapai Rp4,95 triliun, sementara total asetnya hanya Rp5,2 triliun, yang berarti rasio *leverage* keuangannya mendekati 95%. Situasi ini menunjukkan tingginya ketergantungan perusahaan pada utang, yang berpotensi menekan manajemen untuk menghasilkan laba yang tinggi dan menjaga kepercayaan investor. Tekanan ini dapat menjadi faktor praktik manajemen laba dan

mengabaikan prinsip kehati-hatian. Profitabilitas perusahaan pun anjlok. Menurut laporan keuangan tahunan Hanson International, laba bersih yang mencapai Rp 648 miliar pada tahun 2017 anjlok menjadi rugi Rp 1,9 triliun pada tahun 2019. Penurunan ini menunjukkan kondisi keuangan yang tidak stabil serta potensi terjadinya *financial distress*. Situasi tersebut diperburuk oleh fakta bahwa perusahaan menghadapi berbagai tuntutan hukum dan pencabutan izin usaha, sehingga semakin memperburuk persepsi publik terhadap integritas pelaporan keuangan perusahaan.

Selanjutnya, fenomena yang terjadi pada PT Bakrieland Development (ELTY) pada tahun 2022 mencerminkan persoalan serius dalam penerapan *prudence accounting*. Perusahaan mengalami kerugian yang berlangsung terus-menerus, terutama akibat tingginya beban utang dan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tepat waktu. Kondisi ini menimbulkan tekanan likuiditas yang semakin parah, apalagi di tengah penurunan penjualan properti dan ketidakpastian pasar yang memengaruhi pendapatan perusahaan. Meskipun manajemen telah melakukan berbagai upaya seperti restrukturisasi utang, tantangan terbesar tetap muncul dari total liabilitas yang mencapai lebih dari Rp10 triliun (CNBC, 2022).

Masalah utama tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko dan pencatatan keuangan perusahaan kurang mencerminkan prinsip *prudence* akuntansi. Dalam konsep *prudence*, perusahaan seharusnya bersikap konservatif dalam mengakui kewajiban, memperkirakan potensi kerugian, serta menghindari pengakuan pendapatan yang berlebihan. Namun, kasus ELTY justru memperlihatkan bahwa kewajiban dan risiko gagal bayar tidak diantisipasi secara memadai sehingga laporan keuangan sebelumnya tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. Hal ini mengarah pada *overstatement* nilai aset, *understatement* risiko, dan kerentanan yang akhirnya memperburuk posisi keuangan perusahaan.

Secara keseluruhan, kasus PT Bakrieland memberikan gambaran bahwa tanpa penerapan *prudence accounting*, perusahaan rentan menyajikan informasi keuangan yang terlalu optimis dan tidak mencerminkan risiko nyata yang

dihadapi. Hal ini tidak hanya merugikan kreditor dan investor, tetapi juga menghambat proses pengambilan keputusan yang objektif. Fenomena tersebut mempertegas pentingnya *prudence* sebagai mekanisme pengendalian agar laporan keuangan lebih reliabel, terutama dalam industri properti dan real estate yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar dan risiko pembiayaan. Fenomena yang dijelaskan di atas juga menunjukkan kurangnya prinsip akuntansi yang bijaksana dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola utang secara bijaksana serta kegagalannya dalam mencatat liabilitas dan utang secara realistis menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian yang buruk. Prinsip kehati-hatian seharusnya menuntut perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengenali liabilitas dan risiko, menghindari penyajian pendapatan yang berlebihan, dan mengantisipasi potensi kerugian. Kurangnya kehati-hatian dalam mencatat utang dan mengelola pendapatan menyebabkan perusahaan salah menggambarkan situasi keuangan mereka yang sebenarnya, yang mengakibatkan kerugian berkelanjutan dan kerusakan reputasi yang signifikan di mata investor dan kreditor.

Selanjutnya fenomena pada PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA) menjadi indikator nyata belum optimalnya implementasi *prudence accounting* dalam pelaporan keuangan korporasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, emiten ini dijatuhi sanksi denda sebesar Rp 2,7 miliar akibat pelanggaran regulasi pasar modal terkait penyajian laporan keuangan. OJK menemukan pencatatan piutang pihak berelasi senilai Rp 31,25 miliar dan uang muka sebesar Rp 116,7 miliar. Namun, regulator menilai kedua komponen tersebut tidak memiliki kepastian manfaat ekonomi masa depan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset perusahaan. Kasus ini merefleksikan kecenderungan manajemen untuk mempertahankan aset yang tingkat ketidakpastiannya tinggi. Ditinjau dari konsep *prudence accounting*, perusahaan diwajibkan bersikap konservatif dengan tidak mencantumkan akun sebagai aset apabila arus manfaat ekonominya masih meragukan. Sebaliknya, asas kehati-hatian ini mengamanatkan pengakuan segera atas potensi kerugian atau penurunan nilai (*impairment*). Dalam kasus POSA, manajemen justru menerapkan

kebijakan pelaporan yang agresif dengan tetap menyajikan akun-akun tersebut di neraca alih-alih mengakui risiko kerugian yang membayangi

Dampak langsung dari tindakan ini adalah terjadinya *overstatement* (penilaian terlalu tinggi) pada total aset korporasi, yang membuat posisi finansial perusahaan tampak lebih kokoh di atas kertas. Di saat yang sama, penundaan pengakuan beban penurunan nilai mengakibatkan laba bersih yang dilaporkan menjadi lebih tinggi dari kondisi riilnya. Praktik ini jelas berseberangan dengan semangat *prudence* yang menekankan akselerasi pengakuan ekspekta si kerugian dan pembatasan ketat terhadap pengakuan aset atau keuntungan yang belum pasti. Konsekuensi dari rendahnya kualitas informasi ini berisiko memicu kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemangku kepentingan. Investor dapat mengevaluasi kinerja emiten secara keliru, sementara kreditur berpotensi salah mengalkulasi tingkat risiko kredit yang sebenarnya. Selain itu, sanksi formal dari OJK ini secara langsung mereduksi kredibilitas dan kepercayaan pasar modal terhadap transparansi tata kelola perusahaan. Secara komprehensif, kasus PT Bliss Properti Indonesia Tbk menegaskan bahwa pengabaian terhadap asas *prudence accounting* mendorong manajemen bertindak agresif dalam pengakuan aset dan menanggihkan beban kerugian. Pola pelaporan ini menghasilkan laporan keuangan yang gagal merepresentasikan realitas ekonomi sesungguhnya. Oleh karena itu, fenomena empiris ini memperkuat urgensi penelitian mengenai pentingnya *prudence accounting* sebagai instrumen untuk menjamin pelaporan keuangan yang andal, konservatif, dan relevan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerapan *prudence accounting*. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Mubarok *et al.* (2022) menemukan bahwa faktor yang memengaruhi penerapan *prudence accounting* adalah *growth opportunities*, *leverage*, dan *financial distress*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Musbitah *et al.*, 2024) dan (Sasmita & Wijaya, 2023) menemukan faktor-faktor yang lain seperti *intellectual capital* dan profitabilitas. Dari berbagai faktor tersebut, penelitian ini berfokus pada lima

faktor yang dapat memengaruhi *prudence accounting*, di antaranya *growth opportunities*, *leverage*, *financial distress*, *intellectual capital*, dan profitabilitas.

Growth opportunities adalah peluang pertumbuhan yang tinggi rendahnya suatu perusahaan di masa depan yang dapat menentukan keputusan investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Respons positif mengenai pertumbuhan perusahaan akan diperoleh dari investor sehingga nilai pasar perusahaan yang konservatif lebih besar dibandingkan nilai buku sehingga akan tercipta *goodwill* (Usbah & Primasari 2020). Perusahaan dengan *growth opportunity* yang tinggi juga membutuhkan sumber daya yang besar untuk membiayai operasinya. Pembiayaan internal (laba ditahan dan depresiasi) dan pembiayaan eksternal (penerbitan utang atau saham baru) adalah dua sumber pendanaan yang digunakan sebagai pendanaan pertumbuhan perusahaan (Retnani & Khakim, 2019).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zulni & Taqwa, 2023) menunjukkan bahwa *growth opportunities* berpengaruh positif terhadap *prudence accounting*. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian dari Usbah & Primasari (2020) dan Kholif (2025) yang menunjukkan bahwa *growth opportunities* berpengaruh positif terhadap *prudence accounting*, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian guna mengantisipasi ketidakpastian dan risiko di masa mendatang. Berbeda dengan hasil penelitian Aurillya et al. (2021) dan Yusera (2021) yang membuktikan bahwa *growth opportunities* tidak berpengaruh terhadap *prudence accounting*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa prospek pertumbuhan entitas tidak secara otomatis mendorong adopsi kebijakan pelaporan yang konservatif, lantaran atensi manajemen cenderung diprioritaskan pada upaya ekspansi serta peningkatan nilai perusahaan ketimbang penerapan asas kehati-hatian akuntansi

Leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasinya. Proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai investasi ditunjukkan oleh *leverage*.

Ketika jumlah utang perusahaan meningkat, kemungkinan besar perusahaan akan berusaha keras untuk meningkatkan laba, guna meyakinkan konsumen dan pihak-pihak terkait bahwa perusahaan mampu terus memenuhi kewajiban utangnya (Susanti, 2024). Bisa disebut juga jika perusahaan memperoleh asetnya dengan melakukan pinjaman (utang). Rasio *leverage* juga menjadi jaminan bagi pemberi pinjaman untuk pengembalian dana. Ketika jumlah utang perusahaan meningkat, kemungkinan besar perusahaan akan berusaha keras untuk meningkatkan laba, guna meyakinkan konsumen dan pihak-pihak terkait bahwa perusahaan mampu terus memenuhi kewajiban. Tujuan dari hal yang lebih besar ini adalah untuk mengurangi ketimpangan informasi antara kreditur dan pengelola perusahaan Khasanah & Henny (2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fadmaulida & Putra, Abggara, Nur, 2022), Ratnasari (2020), menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *prudence accounting*. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Anjeltusuwa & Pramesti, 2021) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *prudence accounting*, yang mengindikasikan bahwa tingginya tingkat utang mendorong manajemen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga kepercayaan kreditur serta meminimalkan risiko pelanggaran perjanjian utang. Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Kurniawan *et al.* (2022) dan Choirunnissa & Fitria (2022) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh *leverage* terhadap *prudence accounting*. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan kehati-hatian akuntansi tidak semata-mata ditentukan oleh struktur pendanaan perusahaan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor pengendalian internal dan kebijakan manajerial.

Financial distress adalah kondisi di mana perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban finansialnya, yang sering berujung pada kebangkrutan. Ini terjadi ketika perusahaan tidak dapat membayar hutang atau biaya operasional yang bisa memicu penggantian manajer Permatasari *et al.*, (2024). Ancaman tersebut akan mendorong manajer untuk mengatur penyajian laporan keuangan perusahaan yang digunakan oleh pihak yang terkait, termasuk para investor dan

kreditor. Untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya kondisi keuangan perusahaan yang buruk, bahkan untuk menghindari terjadinya kebangkrutan, maka perusahaan harus mengawasi kondisi keuangan dengan teknik-teknik dalam penyajian laporan keuangan, salah satunya prinsip prudence akuntansi, yaitu kehati-hatian dalam penyajian laporan keuangan perusahaan (Nurul Asnah, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Maolana et al., 2025) dan (Anjeltusuwa & Pramesti, 2021) menyatakan *financial distress* berpengaruh positif terhadap *prudence accounting* dan mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami tingkat tekanan finansial yang berat justru mendorong penurunan tingkat penerapan asas kehati-hatian akuntansi, sedangkan di lain pihak, (Pratiwi & Zulfikar, 2024) serta (Rif'an & Agustina, 2021) menyimpulkan bahwa kondisi kesulitan keuangan sama sekali tidak memberikan dampak terhadap *prudence accounting*, yang mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat *financial distress* tidak akan mempengaruhi tingkat *prudence accounting* perusahaan.

Intellectual Capital didefinisikan sebagai aset takberwujud berupa kompetensi, informasi, hak kekayaan intelektual, serta pengalaman yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi entitas bisnis. IC terdiri dari tiga komponen: *human capital* (HU) terletak pada individu, *structural capital* (SC) terletak dalam organisasi, dan *physical capital* terletak pada hubungan antara organisasi dan lingkungan, yang dianggap berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan (Jardon dan Dasilva, 2017). Komponen *physical capital* ini kerap diidentifikasi dengan istilah *capital employed* (CE). *Capital Employed* mengacu pada *financial capital* perusahaan yang terdiri dari *monetary capital* dan *physical capital*. Pengelolaan yang baik atas sumber daya perusahaan dalam bentuk capital asset diyakini akan meningkatkan nilai pasar dan kinerja perusahaan (Pramelasari, 2010). *Human capital* mencerminkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap individu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. Human capital meliputi pengetahuan individu dari suatu organisasi yang ada pada pegawainya yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap dan kecerdasan intelektual. Karyawan yang

berkeahlian dan berketerampilan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menjamin. *Structural capital* mencerminkan seluruh aspek pengetahuan non-manusia yang melekat pada internal organisasi, seperti rutinitas operasional, prosedur kerja, sistem, budaya perusahaan, hingga basis data (*database*). *Structural capital* timbul dari proses dan nilai organisasi yang mencerminkan fokus internal dan eksternal perusahaan disertai pengembangan dan pembaruan nilai untuk masa depan (Nursida et al., 2025).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Smriti & Das, 2018; Ni & Cheng, 2021; Puspita & Wahyudi, 2021; et al., 2022) menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap *prudence accounting*. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal intelektual yang baik mencerminkan kualitas sumber daya manusia, sistem, dan proses pengambilan keputusan yang mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan secara lebih hati-hati dan berkualitas. Hal ini bertolak belakang dengan temuan (Renaldo & Yulia, 2023) yang mengungkapkan bahwa *intellectual capital* tidak memiliki dampak signifikan terhadap *prudence accounting*, di mana apresiasi terhadap nilai perusahaan justru akan terdongkrak saat organisasi mampu mengoptimalkan modalnya secara maksimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan modal intelektual dalam perusahaan lebih difokuskan pada penciptaan nilai dan peningkatan kinerja perusahaan, sehingga tidak secara langsung memengaruhi kebijakan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan *prudence* akuntansi untuk mengelola labanya sehingga tampak stabil dan tidak mudah berubah. Sehingga semakin tinggi profitabilitas, akan semakin tinggi pula penerapan *prudence* akuntansi dalam suatu perusahaan (Rahmad Galih Aditya & Nursiam, 2025). Penerapan *prudence* dalam perusahaan akan tinggi jika nilai profitabilitas yang dihasilkan perusahaan juga tinggi, dan sebaliknya. Prinsip *prudence* diterapkan guna mengontrol kestabilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi tentunya

juga akan membayar nilai politis yang tinggi pula, seperti biaya pajak, sehingga perusahaan lebih memilih untuk melaporkan hasil keuntungan yang relatif rendah agar beban yang dibayarkan tidak terlalu besar (Choirunnissa & Fitria, 2022).

Bukti empiris dari studi yang dipublikasikan oleh Usbah & Primasari (2020) serta Choirunnissa & Fitria (2022) mengonfirmasi bahwa tingkat profitabilitas memberikan dampak positif terhadap penerapan *prudence accounting*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kholif (2025) profitabilitas berpengaruh positif terhadap *prudence accounting*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka manajemen akan semakin terdorong untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan sebagai bentuk pengendalian terhadap konflik keagenan serta upaya menjaga kredibilitas informasi keuangan yang disajikan kepada investor dan kreditur. Sedangkan Abdurrahman & Ermawati (2019) dan Pratidina & Majidah (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *prudence accounting*. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat laba perusahaan tidak selalu mendorong manajemen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, karena laba yang tinggi lebih dipandang sebagai indikator kinerja positif sehingga tidak memicu kebutuhan untuk bersikap konservatif dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan karena inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *prudence accounting*. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi terkait pengaruh *growth opportunities*, *leverage*, *financial distress*, *intellectual capital*, dan *profitabilitas* terhadap penerapan *prudence accounting*. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengklarifikasi inkonsistensi tersebut. Hal ini merupakan kesenjangan penelitian yang mendasari penelitian ini.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Anjeltuswa dan Dewi (2021). Penulis menambahkan *growth opportunities* dan *intellectual capital* sebagai faktor yang diduga memengaruhi *prudence accounting*. Lebih lanjut, penelitian tentang hubungan antara *intellectual capital*,

growth opportunities, dan *prudence accounting* masih terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif. Objek penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya, yang umumnya berfokus pada badan usaha milik negara (BUMN) atau sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan di sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2019–2023. Sektor ini dipilih karena karakteristiknya yang dinamis dan kerentanannya terhadap risiko keuangan, sehingga relevan untuk dianalisis terkait dengan judul “**Pengaruh *Growth Opportunities*, *Leverage*, *Financial Distress*, *Intellectual Capital*, dan *Profitabilitas* terhadap *Prudence Accounting***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *growth opportunities* terhadap *prudence accounting*?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *prudence accounting*?
3. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *prudence accounting*?
4. Bagaimana pengaruh *intellectual capital* terhadap *prudence accounting*?
5. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *prudence accounting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *growth opportunities* terhadap *prudence accounting*.
2. Pengaruh *leverage* terhadap *prudence accounting*.
3. Pengaruh *financial distress* terhadap *prudence accounting*.
4. Pengaruh *intellectual capital* terhadap *prudence accounting*.
5. Pengaruh profitabilitas terhadap *prudence accounting*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terkait pengembangan ilmu dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi

mengenai pengaruh *growth opportunities*, *leverage*, *financial distress*, *intellectual capital* dan profitabilitas terhadap *prudence accounting*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari hasil pengembangan pengetahuan ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tinjauan atau masukan bagi perusahaan dalam menerapkan prinsip *prudence* dengan memperhatikan faktor-faktor *growth opportunities*, *leverage*, *financial distress*, dan profitabilitas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian di masa yang akan datang, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengetahuan tambahan khususnya di bidang akuntansi mengenai penerapan *prudence accounting*.